

ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) BERBASIS *VALUE FOR MONEY* PADA DINAS TENAGA KEJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BUTON SELATAN

Dita Dwi Lestari^{*1}, Dewi Mahmuda²

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Buton,
Baubau, Indonesia

e-mail: dwilestaridita9@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) berbasis *value for money* pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan yang beralamat di Jalan Poros Batauga, Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2024. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rasio ekonomi pada tahun 2021 seluruh program dinyatakan ekonomis dan pada tahun 2022 program perencanaan tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, program hubungan industrial, dan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dinyatakan ekonomis sedangkan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan program perencanaan kawasan transmigrasi dinyatakan ekonomis seimbang. Rasio efisiensi tahun 2021 menunjukkan indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat produktivitas tenaga kerja dinyatakan tidak efisien dan indikator kinerja persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan efisien, pada tahun 2022 menunjukkan indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dinyatakan tidak efisien dan pada indikator kinerja persentase tingkat produktivitas tenaga kerja dan persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan efisien. Rasio efektivitas tahun 2021 menunjukkan indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dinyatakan tidak efektif, persentase tingkat produktivitas tenaga kerja dinyatakan efektif dan persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan efektif berimbang, pada tahun 2022 indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat produktivitas tenaga kerja dinyatakan efektif dan pada indikator kinerja persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan efektif berimbang.

Kata Kunci: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, *Value for Money*, Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas

ABSTRACT

This study aims to determine the accountability report on the performance of government agencies (lakip) based on value for money at the Manpower and Transmigration Office of

South Buton Regency. The research method used is descriptive with a qualitative approach. This research was conducted at the Manpower and Transmigration Office of South Buton Regency which is located at Jalan Poros Batauga, Lakambau Village, Batauga District, South Buton Regency, Southeast Sulawesi Province. This research will be conducted in January – February 2024. The results showed that the economic ratio in 2021 all programs were declared economical and in 2022 the manpower planning program, labor placement program, industrial relations program, and supporting program of district/city local government affairs were declared economical while the job training and labor productivity program and transmigration area planning program were declared economically balanced. The efficiency ratio in 2021 shows performance indicators, the percentage of job seekers placed and the percentage of labor productivity levels declared inefficient, and performance indicators, the average percentage of results achieved by OPD support programs are declared efficient, in 2022, it shows performance indicators, the percentage of job seekers placed is declared inefficient, and in performance indicators, the percentage of labor productivity levels and the average percentage of results in achieving the implementation of OPD support programs are declared efficient. The effectiveness ratio in 2021 shows that the performance indicators of the percentage of job seekers placed are declared ineffective, the percentage of labor productivity levels declared effective and the average percentage of results achieved in the implementation of OPD support programs are declared effective balanced, in 2022 the performance indicators of the percentage of job seekers placed and the percentage of labor productivity levels are declared effective and in the performance indicators the average percentage of the results of the achievement of the implementation of OPD support programs is declared effective balanced.

Keywords: *Government Agency Performance Accountability Report, Value for Mone, economy, efficiency, effectiveness*

1. PENDAHULUAN

Instansi pemerintah dikatakan sebagai unsur dalam aparatur negara yang berkaitan dengan pemerintahan, instansi pemerintah merupakan bentuk dari pengabdian masyarakat terhadap pemerintah dalam membangun sesuai bidangnya. Instansi pemerintah adalah salah satu dari sumber penting dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah khususnya dalam melaksanakan pembangunan nasional (*good governance*). Berhasil atau tidaknya instansi dalam mensukseskan dan mewujudkan pembangunan nasional didukung oleh beberapa faktor penting, diantaranya sistem pelaporan keuangan instansi dan kinerja instansi pemerintah (Setiawan, 2016).

Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik (Arfan, 2014).

Akuntabilitas publik pada biasanya bukan cuma hanya keahlian dalam menampilkan bagaimana uang publik bisa dipergunakan secara ekonomis, efisiensi dan efektif, namun akuntabilitas publik pula berkaitan dengan sesuatu kewajiban dalam membagikan informasi dan pertanggungjawabannya tentang apa yang sudah dibelanjakan serta yang lagi direncanakan oleh institusi pemerintah tersebut. Akuntabilitas publik ini pula bisa berfungsi

untuk mengukur kinerja suatu institusi pemerintahan sehingga bisa diketahui sejauh mana kinerja pelayanan publik sudah dilaksanakan (Rahman, 2021).

Tuntutan akan kualitas kinerja pada pemerintah daerah dapat dinilai menggunakan konsep *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Kinerja pemerintah tidak hanya dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersamaan. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berarti perolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Efisiensi, berarti pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian dalam rangka pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme manajemen pemerintahannya yang bertumpu pada perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang baik (Wadoe, 2021).

Value for Money (VFM) dapat tercapai apabila suatu organisasi telah menggunakan input paling rendah untuk mencapai output paling maksimal sebagai bentuk pencapaian tujuan organisasi. Dan selain Value for Money (VFM), dikenal istilah akuntabilitas. Yang merupakan *output* penilaian kinerja berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang wajib dilaporkan. Kinerja pemerintah ini dibuat atau direncanakan sesuai dengan Restra (Rencana Strategis) dengan jangka waktu 5 tahun (Masyhuri, 2022).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran strategis suatu instansi, dimana laporan tersebut disusun berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama satu tahun. Dalam penyusunan LAKIP, suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Adapun salah satu manfaat dari LAKIP ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama satu tahun anggaran (Widianto dan Karina, 2021).

Bersumber dari Baupaupost.com, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara telah melakukan penilaian kinerja terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara secara resmi menyerahkan hasil penilaian kepatuhan tahun 2022 kepada Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan. Acara penyerahan hasil penilaian tersebut dihadiri oleh PJ Bupati Buton Selatan La Ode Budiman, SKM., M.MKes beserta jajaran kepala dinas terkait. Dalam laporannya, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara mengungkapkan bahwa pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah memenuhi nilai akhir dan zona 56,31 Kategori C indikator kepatuhan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, PJ Bupati Buton Selatan La Ode Budiman, SKM., M.MKes. meminta kepada OPD yang kinerjanya dinilai kurang memuaskan segera melakukan evaluasi, khususnya dalam kinerja pelayanan publik, penyerapan anggaran, realisasi output dan akuntabilitas kinerja lebih diperhatikan.

Karena kinerja pemerintah tidak hanya dilihat dari sisi *output* yang dihasilkan saja, tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersamaan. Maka dalam hal ini, penulis akan menggunakan konsep *Value for Money* (VFM) untuk menguji kinerja pemerintah melalui LAKIP yang dibuat. *Value for Money* (VFM)

merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Berbasis *Value for Money* Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Value for Money

Menurut Mahmudi dalam Ramadhani (2021) menyatakan bahwa “konsep *Value for Money* adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik sehingga sering kali disebut dengan inti dari pengukuran kinerja sektor publik, VFM juga mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebagaimana mestinya”.

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, melainkan harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* bersama-sama (Mardiasmo dalam Indriaswari, 2017).

Manfaat *Value for Money*

Manfaat implementasi konsep *Value for Money* pada organisasi sektor publik antara lain (Masyhuri, 2022) :

- a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran
- b. Meningkatkan mutu pelayanan publik
- c. Menurunkan biaya pelayanan publik kinerja in-efisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input
- d. Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik
- e. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*)

Langkah-Langkah *Value for Money*

Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (*input*) sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang lebih rendah (*spending less*) atau harga yang mendekati harga pasar (Valdino R, 2023).

Selain itu, pengukuran ekonomi membutuhkan data-data tentang anggaran pengeluaran dan realisasinya. Untuk mencocokkan seberapa besar tingkat ekonomi suatu anggaran berdasarkan pengeluaran yang ekonomi suatu anggaran dibutuhkan rumus matematis di bawah ini (Mahmudi, 2015) :

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Nilai Input}} \times 100\%$$

keterangan:

Input : Realisasi anggaran daerah yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022.

Nilai *Input* : Anggaran Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022.

Menurut Mahsun (2016) Kriteria kinerja sektor publik yang dapat disebut ekonomis yaitu sebagai berikut:

- a. Dinyatakan ekonomis apabila ditemukan nilai kurang dari 100%
- b. Dinyatakan ekonomis berimbang apabila ditemukan nilai sama dengan 100%
- c. Dinyatakan tidak ekonomis apabila ditemukan nilai lebih dari 100%

Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diartikan sebagai penggunaan *input* yang minimal dengan pencapaian *output* yang optimal. Efisiensi merupakan perbandingan *output* dan *input* yang dihubungkan dengan target atau standar kerja yang telah ditetapkan (Pratiwi, 2016).

Menurut Mahmudi (2015) rumus yang digunakan untuk mengukur efisiensi adalah:

$$efisiensi = \frac{output}{input} \times 100\%$$

keterangan:

Output : Persentase capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan 2021-2022.

Input : Persentase capaian anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022.

Menurut Mahsun (2016) Kriteria kinerja sektor publik yang dapat disebut efisiensi yaitu sebagai berikut:

- a. Dinyatakan tidak efisien apabila ditemukan nilai kurang dari 100%
- b. Dinyatakan efisien berimbang apabila ditemukan nilai sama dengan 100%
- c. Dinyatakan efisien apabila ditemukan nilai lebih dari 100%

Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah tolak ukur keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil memenuhi sarannya, sehingga bisa dikatakan bahwa organisasi tersebut telah beroperasi secara efektif. Jadi efektivitas tidak menentukan mengenai berapa banyak biaya yang keluar selagi pencapaian tujuan tersebut. Tapi efektivitas melihat bagaimana organisasi tersebut sudah memenuhi tujuan yang diharapkan (Mardiasmo, 2018).

Menurut Mahmudi (2015) tingkat efektivitas bisa diukur melalui rumus:

$$efektivitas = \frac{outcome}{output} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome: Persentase realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022.

Output : Persentase target kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022.

Menurut Mahsun (2016) kriteria kinerja sektor publik yang dapat disebut efektif yaitu sebagai berikut:

1. Dinyatakan tidak efektif apabila ditemukan nilai kurang dari 100%

2. Dinyatakan efektivitas berimbang apabila ditemukan nilai sama dengan 100%
3. Dinyatakan efektif apabila ditemukan nilai lebih dari 100%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mendefinisikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk pemerintah daerah tingkat Provinsi dan kabupaten atau kota, instansi pemerintah yang dimaksud ialah Satuan Kerja Pemerintah yang telah diberikan hak serta tanggung jawab dalam mengelola sendiri administrasi serta keuangannya. Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan pada siklus anggaran tahun yang sedang berjalan yaitu satu tahun.

Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Adapun fungsi LAKIP adalah sebagai berikut (Agustin dan Subardjo, 2017):

- a. Sarana hubungan kerja organisasi yang berfungsi sebagai wadah pengolahan informasi dan data.
- b. Bentuk pertanggungjawaban tertulis suatu organisasi kepada pemberi wewenang dan amanah, sehingga LAKIP juga berfungsi sebagai laporan dari pimpinan unit organisasi.
- c. LAKIP memuat kinerja instansi dan akuntabilitasnya, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran organisasi.
- d. Sebagai media informasi sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) diterapkan, termasuk penerapan fungsi manajemen yang benar pada instansi terkait.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan. Menurut sugiyono (2017: 81), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 sampai 2022.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data untuk bahan analisis dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan perpustakaan (*liblary research*).

Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis memakai metode deskriptif yaitu, menganalisa dan mengumpulkan data, yang kemudian disusun berdasarkan kelompoknya agar data-data tersebut bisa diteliti dengan berdasarkan teori yang relevan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas dan kemudian akan memperoleh kesimpulan. Pada tahap pertama dari penelitian, dilakukannya pengumpulan data seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), lalu data diolah serta dihitung atau dianalisis dengan menggunakan indikator *Value for Money* untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan. Hasil dari perhitungan yang didapatkan kemudian dijabarkan kedalam bentuk kata untuk mendeskripsikan makna dari angka yang telah didapat dari hasil perhitungan tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Pengukuran Ekonomi

Pengukuran rasio ekonomi berdasarkan data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022 adalah:

Tabel 1. Pengukuran Ekonomi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Rasio (%)	Keterangan
1.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Program Perencanaan Tenaga Kerja	53.361.500,00	53.272.000,00	99,83	Ekonomis
		Program Penempatan Tenaga Kerja	255.150.500,00	255.147.500,00	99,99	Ekonomis
2.	Persentase Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	64.856.200,00	64.346.000,00	99,21	Ekonomis
		Program Hubungan Industrial	137.375.000,00	136.995.500,00	99,72	Ekonomis
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	55.640.000,00	55.479.000,00	99,71	Ekonomis
3.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	1.301.152.983,00	1.200.862.602,00	92,29	Ekonomis

n
 pelaksanaan
 program
 pendukung
 OPD

Daerah
 Kabupaten/K
 ota

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 1 hasil perhitungan LAKIP tingkat rasio ekonomi dengan menggunakan metode Value for Money menunjukkan bahwa seluruh program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2021 dinyatakan “ekonomis” karena rasio ekonomi kurang dari seratus 100%.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bapak Ruslan Tarfin, S.STP pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 pukul 11.00 WITA. mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan penganggaran yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan yaitu disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian disusun dalam rencana kerja anggaran (RKA). Dengan disusunnnya anggaran belanja langsung tentu akan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat karena belanja langsung adalah anggaran yang langsung bersentuhan dengan masyarakat”

Senada dengan hal diatas, hasil wawancara dengan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan, Ibu Wa Ode Heni Anggraini, S.Sos pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 10.00 WITA, mengatakan bahwa :

“Perhitungan untuk program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 telah berjalan secara ekonomis. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan selalu mengidentifikasi potensi birokrasi yang tidak perlu atau hambatan administratif yang dapat dikurangi sehingga anggaran yang diberikan oleh pemerintah bisa digunakan dan direalisasikan dengan baik. Hal ini bisa dilihat juga pada realisasi anggaran yang ada pada LAKIP tahun 2021, untuk anggaran seluruh program yang diberikan oleh APBD-P sebesar Rp.1.867.536.183 dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.1.766.102.602, artinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan untuk tahun 2021 menghemat anggaran APBD-P sebesar Rp.101.433.581”

Tabel 2. Pengukuran Ekonomi Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Rasio (%)	Keterangan
1.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Program	170.000.000,00	168.000.000,00	98,82	Ekonomis
		Perencanaan Tenaga Kerja				
		Program	77.807.000,00	77.709.000,00	99,87	Ekonomis

		Penempatan Tenaga Kerja				
2.	Persentase Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	18.900.000,00	18.900.000,00	100	Ekonomis Seimbang
		Program Hubungan Industrial	101.549.400,00	100.993.500,00	99,45	Ekonomis
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	31.625.000,00	31.625.000,00	100	Ekonomis Seimbang
3.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.496.059.295,00	1.485.834.852,00	99,31	Ekonomis

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 2 hasil perhitungan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan pada tingkat rasio ekonomi tahun 2022 dengan menggunakan metode Value for Money menunjukkan bahwa pada persentase tingkat produktifitas tenaga kerja terdapat 2 program dinyatakan “ekonomis seimbang” karena nilai sama dengan 100% dan 4 program lainnya dinyatakan “ekonomis” karena nilai kurang dari 100%.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Plt.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan, Ibu Wa Ode Heni Anggraini, S.Sos pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 10.00 WITA, mengatakan bahwa :

“Untuk 2 program yang dinyatakan ekonomis seimbang yaitu program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan program perencanaan kawasan transmigrasi anggaran yang diberikan oleh APBD-P digunakan sepenuhnya oleh Dinas dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pelatihan unit kopetensi yang diikuti oleh kurang lebih 20 orang membutuhkan biaya yang cukup dan untuk 4 program lainnya Dinas bisa melakukan penghematan anggaran. Total anggaran APBD-P untuk seluruh program yang ada pada tahun 2022 sebesar Rp.1.895.940.695 dan anggaran yang digunakan sebesar Rp.1.883.062.352 untuk itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan untuk Tahun 2022 bisa menghemat anggaran APBD-P sebesar Rp.12.878.343”

Hasil Pengukuran Efisiensi

Pengukuran rasio efisiensi berdasarkan data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022 adalah:

Tabel 3 Pengukuran Efisiensi Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Nilai Rasio (%)	Keterangan
1.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	99,97	40,10	40,11	Tidak Efisien
2.	Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja	99,59	80	80,32	Tidak Efisien
3.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	92,29	100	108,3	Efisien

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 3 hasil perhitungan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan pada tingkat rasio efisiensi tahun 2021 dengan menggunakan metode Value for Money menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan “tidak efisien” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan kurang dari 100% dan pada indikator kinerja persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program OPD dinyatakan “efisien” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan lebih dari 100%.

Hal tersebut diatas didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bapak Alimin, S.Sos.,M.Si pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 pukul 09.00 WITA yang mengatakan bahwa :

“Seluruh kinerja yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan bisa diukur kinerjanya baik output maupun outcomenya sehingga bisa dikatakan efisien atau tidak. Kinerja yang baik dapat dikatakan efisien jika nilai kinerjanya lebih dari 100%. Efisien diartikan sebagai penggunaan input yang minimal dengan pencapaian output yang optimal oleh karena itu, dapat dilihat untuk tahun 2021 indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat produktifitas tenaga kerja memerlukan anggaran yang cukup untuk menghasilkan kinerja yang optimal sehingga dikatakan tidak efisien, sedangkan pada indikator kinerja persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD bisa menghasilkan kinerja yang optimal dengan keluaran atau anggaran yang ekonomis sehingga dikatakan efisien”.

Tabel 4 Pengukuran Efisiensi Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Nilai Rasio (%)	Keterangan
1.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	99,15	78,04	99,63	Tidak Efisien
2.	Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja	99,63	560	562,07	Efisien
3.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	99,31	100	100,69	Efisien

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 4 hasil perhitungan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan pada tingkat rasio efisiensi tahun 2022 dengan menggunakan metode Value for Money menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dinyatakan “tidak efisien” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan kurang dari 100% dan pada indikator kinerja persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dan persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program OPD dinyatakan “efisien” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan lebih dari 100%.

Hal tersebut diatas didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bapak Alimin, S.Sos.,M.Si pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 pukul 09.00 WITA yang mengatakan bahwa :

“Rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefesiesikan biaya yang dikeluarkan dari pemerintah. Untuk Tahun 2022 indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan membutuhkan anggaran yang cukup untuk menghasilkan kinerja yang optimal sesuai dengan target yang ditetapkan sedangkan pada indikator persentase tingkat produktivitas tenaga kerja dan persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD bisa menghasilkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dengan realisasi anggaran yang ekonomis sehingga dapat dikatakan efisien”

Hasil Pengukuran Efektivitas

Pengukuran rasio efektivitas berdasarkan data dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021-2022 adalah:

Tabel 5 Pengukuran Efektivitas Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Outcome (%)	Output (%)	Nilai Rasio (%)	Keterangan
1.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	40,10	71	56,47	Tidak Efektif

2.	Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja	80	50	160	Efektif
3.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100	100	100	Efektif Berimbang

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 5 hasil perhitungan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan pada tingkat rasio efektivitas tahun 2021 dengan menggunakan metode Value for Money menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dinyatakan “tidak efektif” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan kurang dari 100%, persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan “efektif” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan lebih dari 100% dan persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program OPD dinyatakan “efektif berimbang” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan sama dengan 100%.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bapak Ruslan Tarfin, S.STP pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 pukul 11.00 WITA. mengatakan bahwa:

”Memang pada indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2021 tidak efektif dikarenakan selain belum berakhirnya pandemi covid-19 juga karena tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda dengan Pendidikan SMA ke bawah serta kurangnya informasi yang didapatkan dari para pencari kerja yang sudah terdaftar bekerja atau belum bekerja. Meskipun demikian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan selalu berupaya dalam memfasilitasi dan melayani masyarakat”

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bapak Alimin, S.Sos.,M.Si pada hari Senin Tanggal 19 Februari 2024 pukul 09.00 WITA, mengatakan bahwa

“Pada indikator kinerja produktifitas tenaga kerja tahun 2021 dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi target capaian dari 50% dan terealisasi 80% hal ini dikarenakan adanya juga dukungan dari Kementerian Tenaga Kerja melalui Balai Latihan Kerja (Kendari) berupa pelatihan Berbasis Kompetisi sebanyak 1 Kelas Pelatihan Menjahit yang bisa meningkatkan keterampilan dan menambah nilai produktivitas masyarakat dalam hal keahlian serta kompetisi yang ada”

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Transmigrasi, Bapak Aludin, SKM pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 pukul 10.00 WITA, mengatakan bahwa:

“Pada indikator kinerja Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD tahun 2021 sudah tercapai dengan target yang ditetapkan 100% dan realisasinya 100%. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan selalu berupaya agar pelayanan publik kepada masyarakat dan juga dokumen-dokumen yang akan dibutuhkan untuk pelaporan pertanggungjawaban

terlealisasi dengan sebaik mungkin untuk memastikan akuntabilitas yang baik dalam pelaksanaan program pendukung OPD”.

Tabel 6 Pengukuran Efektivitas Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Outcome (%)	Output (%)	Nilai Rasio (%)	Keterangan
1.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	78,04	75	104,05	Efektif
2.	Persentase tingkat produktifitas tenaga kerja	560	55	101,81	Efektif
3.	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100	100	100	Efektif Berimbang

Sumber: data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 6 hasil perhitungan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan pada tingkat rasio efektivitas tahun 2022 dengan menggunakan metode Value for Money menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan “efektif” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan lebih dari 100% dan pada persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan “efektif berimbang” dikarenakan pada hasil perhitungan nilainya menunjukkan sama dengan 100%.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bapak Ruslan Tarfin, S.STP pada hari Rabu, Tanggal 21 Februari 2024 pukul 11.00 WITA, mengatakan bahwa:

“Pada indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2022 sudah mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya lowongan pekerjaan dari sektor pertambangan sehingga membuka peluang bagi angkatan kerja ataupun pengangguran yang ada di Kabupaten Buton Selatan. Akan tetapi ada kendala yang terjadi pada penempatan tenaga kerja dikarenakan kurangnya informasi yang didapatkan dari para pencari kerja yang sudah terdaftar bekerja atau belum bekerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tetap melakukan monitoring dan evaluasi agar tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten Buton Selatan menurun”.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Bapak Alimin, S.Sos.,M.Si pada hari Senin, Tanggal 19 Februari 2024 pukul 09.00 WITA, mengatakan bahwa:

“Pada indikator persentase tingkat produktifitas tenaga kerja sudah terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh Kementerian Tenaga Kerja melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP Kendari) berupa pelatihan berbasis kompetensi

sebanyak 7 kelas yang diikuti oleh 112 orang dan bisa menambah nilai produktivitas masyarakat dalam keahlian dan kompetensi yang ada”

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Transmigrasi, Bapak Aludin, SKM pada hari Rabu Tanggal 21 Februari 2024 pukul 10.00 WITA, mengatakan bahwa:

“Pada indikator kinerja persentase rata-rata ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD Tahun 2022 sudah mencapai target yaitu 100% dan terealisasi 100%. Meskipun terkendala kurangnya Sumber Daya Manusia dan Koordinasi dalam penyusunan anggaran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Selatan selalu berupaya agar seluruh proses administrasi yang akan dilaporkan bisa terealisasi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya”.

Pembahasan

Rasio Ekonomi

Berdasarkan analisis data, dapat diketahui bahwa dari sisi ekonomi seluruh Program yang ada pada sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan memperoleh perhitungan ekonomi yang sangat baik. Hasil analisis menunjukkan 6 program yang telah dilaksanakan dinyatakan ekonomis yaitu memperoleh nilai kurang dari 100%. Dan pada hasil analisis data perhitungan LAKIP pada tingkat rasio ekonomi tahun 2022 dengan menggunakan metode value for money menunjukkan pada sasaran strategis persentase tingkat produktifitas tenaga kerja terdapat 2 program dinyatakan ekonomis seimbang dengan nilai sama dengan 100% dan 4 program lainnya dinyatakan ekonomis dengan nilai kurang dari 100% persen. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Buton Selatan mampu menggunakan dana dengan hemat, yaitu untuk tahun 2021 menghemat anggaran APBD-P sebesar Rp.101.433.581 dan untuk tahun 2022 menghemat anggaran APBD-P sebesar Rp.12.878.343.

Hasil tersebut diatas berdasarkan dengan kriteria kinerja sektor publik yang diberikan oleh Mahsun (2016). Kinerja sektor publik dapat dinyatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai kurang dari seratus persen, jika rasio yang dicapai sama dengan seratus persen dikatakan ekonomis seimbang dan jika rasio yang dicapai nilainya lebih dari seratus persen dikatakan tidak ekonomis. Menurut Valdino R (2023) Ekonomis memiliki pengertian bahwa dalam memperoleh sumber daya (input) sebaiknya dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang lebih rendah (spending less) atau harga yang mendekati harga pasar. Semakin kecil rasio ekonomi berarti kinerja suatu sektor publik semakin baik. Kegiatan operasional suatu organisasi sektor publik dapat dikatakan ekonomis jika mampu menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.

Rasio Efisiensi

Berdasarkan analisis data, dapat diketahui hasil perhitungan LAKIP pada tingkat rasio efisiensi tahun 2021 dengan menggunakan metode value for money menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan tidak efisien karena pada hasil perhitungan nilainya kurang dari 100% dan pada indikator kinerja persentase rata-rata hasil ketercapaian

pelaksanaan program OPD dinyatakan efisien karena hasil perhitungan nilainya lebih dari 100%.

Hasil perhitungan LAKIP pada tingkat rasio efisien tahun 2022 dengan menggunakan metode value for money menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dinyatakan tidak efisien karena hasil perhitungan nilainya kurang dari 100% dan pada indikator kinerja persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dan persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program OPD dinyatakan efisien karena hasil perhitungan nilainya lebih dari 100%.

Hasil tersebut diatas berdasarkan dengan kriteria kinerja sektor publik yang diberikan oleh Mahsun (2016). Kinerja sektor publik bisa dikatakan efisien jika rasio yang dicapai lebih dari seratus persen, dikatakan efisien berimbang jika rasio yang dicapai sama dengan seratus persen dan dikatakan tidak efisien jika rasio yang dicapai kurang dari seratus persen. Menurut Pratiwi (2016:7) Efisiensi diartikan sebagai penggunaan input yang minimal dengan pencapaian output yang optimal. Efisiensi merupakan perbandingan *output* dan *input* yang dihubungkan dengan target atau standar kerja yang telah ditetapkan.

Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil analisis data, hasil perhitungan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan pada tingkat rasio efektivitas tahun 2021 dengan menggunakan metode Value for Money menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dinyatakan tidak efektif karena hasil perhitungan nilainya kurang dari 100%, persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan efektif karena hasil perhitungan nilainya lebih dari 100% dan persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program OPD dinyatakan efektif berimbang karena pada hasil perhitungan nilainya sama dengan 100%.

Hasil perhitungan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan pada tingkat rasio efektivitas tahun 2022 dengan menggunakan metode Value for Money menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan efektif karena hasil perhitungan nilainya lebih dari 100% dan pada persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan efektif berimbang karena hasil perhitungan nilainya sama dengan 100%.

Hasil tersebut diatas berdasarkan dengan kriteria kinerja sektor publik yang diberikan oleh Mahsun (2016). Kinerja sektor publik bisa dikatakan efektif jika rasio yang dicapai lebih dari 100%, dikatakan efektif seimbang jika rasio yang dicapai sama dengan 100% dan dikatakan tidak efektif jika rasio yang dicapai kurang dari 100%. Menurut Mardiasmo (2018), Efektivitas adalah tolak ukur keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil memenuhi sasarannya, sehingga bisa dikatakan bahwa organisasi tersebut telah beroperasi secara efektif. Jadi efektivitas tidak menentukan mengenai berapa banyak biaya yang keluar selagi pencapaian tujuan tersebut. Tapi efektivitas melihat bagaimana organisasi tersebut sudah memenuhi tujuan yang diharapkan (Mardiasmo, 2018).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Berbasis Value for Money Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Rasio Ekonomis pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 seluruh program dinyatakan ekonomis dan tahun 2022 program perencanaan tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, program hubungan industrial, program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dinyatakan ekonomis dan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dan program perencanaan kawasan transmigrasi dinyatakan ekonomis seimbang

Rasio Efisiensi pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 menunjukkan indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan tidak efisien dan indikator kinerja persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan efisien. Pada tahun 2022 menunjukkan indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dinyatakan tidak efisien dan pada indikator kinerja persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dan persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan efisien.

Rasio Efektivitas pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan tahun 2021 menunjukkan indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dinyatakan tidak efektif, persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan efektif dan persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan efektif berimbang. Pada tahun 2022 indikator kinerja persentase pencari kerja yang ditempatkan dan persentase tingkat produktifitas tenaga kerja dinyatakan efektif dan pada indikator kinerja persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD dinyatakan efektif berimbang.

6. SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan untuk ditahun selanjutnya diharapkan membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan dengan baik agar dapat menghasilkan kinerja yang efisien dan juga mengevaluasi program kegiatan yang dijalankan agar dapat memperbaiki kinerja dan dapat memenuhi elemen-elemen value for money Penerapan *value for money* sangat bermanfaat sebagai pengukur kinerja sektor publik yang telah dijalankan serta meningkatkan kerjasama antar sub bagian sehingga mampu mencapai target secara ekonomis, efisien dan efektif.
- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menggunakan data yang lebih lengkap lagi agar hasil penelitian yang dilakukan mendekati kebenaran.

7. DAFTAR PUSTAKA

Agustin, R. D., & Subardjo, A. 2017. *Konsep value for money dalam mengukur kinerja pelayanan sektor publik*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 6(6).

- Arfan, D. A. 2014. *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yog-yakarta Periode Tahun 2011-2012*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Baubaupost.com. 2023. *Pj Bupati Buton Selatan La Ode Budiman Terima Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Ada Peningkatan Kinerja di Banding Tahun 2022*. diakses pada 1 Februari 2024. dari <https://baubaupost.com/66388/pj-bupati-busel-la-ode-budiman-terima-nilai-kepatuhan-pelayanan-publik-dari-ombudsman-ri-perwakilan-sultra-ada-penngkatan-kinerja-di-banding-tahun-2022/busel/2023/03/10/09>
- Fitriani. 2017. *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hasanah, U., Hidayat, M. T. 2023. *Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Value For Money Sebagai Perwujudan Good Governance (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Surabaya Tahun 2017-2021)*. Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 4(3), 2673-2693.
- Indriaswari, L. K. 2017. *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2014-2016*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mahmudi, R. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Muhamad. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Pubik*. Edisi Pertama. Cetakan Keenam. BPF E Anggota IKAPI. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Andi. Yogyakarta.
- Masyhuri, M. R. 2022. *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya..
- Pratiwi, W. 2016. *Audit Sektor Publik*. Bogor: In Media.
- Rahman, W. A. 2021. *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Ramadhani, R. 2022. *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.
- Setiawan, A. B., & Gustia, W. 2016. *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor*. Jurnal akunida, 2(2), 14-26.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syafitri, L. 2021. *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Valdino R, F. 2023. *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Berdasarkan Value for Money Pada Pemerintah Kota Parepare*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Wadoe, B. W. Y. 2021. *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Di Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017-2019*. Kupang: Universitas Nusa Cendana.

Wildani, R. W. 2019. *Pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip value for money pada dinas administrasi ekonomi dan pembangunan*. Kota Batu: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Zhafirah, A. 2022. *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Provinsi Riau*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Zulhelmy, H., Arif, E., & Garini, N. T. 2021. *Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau*. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 198-211.